

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan ialah permasalahan multidimensional yang mencakup aspek sosial dan ekonomi, serta tetap menjadi prioritas penanganan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program pembangunan dan bantuan sosial, tingkat kemiskinan di sejumlah daerah masih relatif tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencerminkan adanya tren penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, namun disparitas antarwilayah masih substansial. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya peluang kerja, yang secara simultan menghambat percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah-wilayah rentan.

Jawa Timur, meskipun berperan sebagai salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, masih menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan. Provinsi ini tercatat memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Ketimpangan antarwilayah, terutama antara daratan utama dan wilayah Madura, menjadi permasalahan yang substansial. Tingginya angka kemiskinan di wilayah Madura dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, akses layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta minimnya diversifikasi ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Terletak di ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumenep ialah salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Potensi ekonomi di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata belum sepenuhnya mampu mengurangi

disparitas kesejahteraan dibandingkan kabupaten lain di Jawa Timur. Tiga indikator penting yang memengaruhi kondisi ini IPM, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat partisipasi tenaga kerja, yang secara kolektif menentukan kemampuan daerah dalam mendongkrak kesejahteraan penduduk dan menekan angka kemiskinan.

Potensi sumber daya alam dan pariwisata Kabupaten Sumenep, termasuk wisata religi Asta Tinggi, Bukit Tawap, dan Gua Payudan, memiliki prospek pengembangan yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, kemiskinan tetap menjadi tantangan utama. Data BPS tahun 2024 mencerminkan tingkat kemiskinan sejumlah 17,78%, menjadikan Sumenep sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Sampang dan Bangkalan.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumenep Tahun 2012-2023

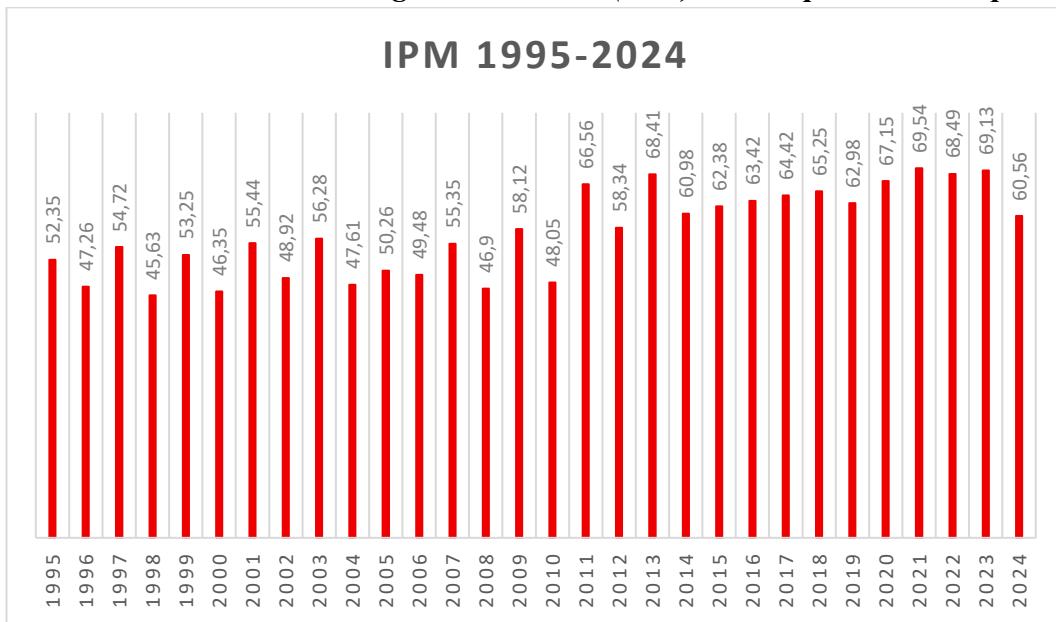


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Fakta ini menegaskan adanya ketidakseimbangan antara potensi ekonomi yang dimiliki dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian

komprehensif mengenai pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi tenaga kerja atas penurunan kemiskinan di daerah ini.

IPM ialah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memiliki pengaruh substansial atas tingkat kemiskinan. Berdasarkan teori ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi idealnya dapat mendorong kenaikan pendapatan masyarakat alhasil berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Namun, dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan, terutama apabila distribusi pendapatan tidak merata. Jayadi dan Brata (2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif dan substansial atas kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan angka kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan secara menyeluruh. Pertumbuhan yang adil dan berkualitas adalah yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui sektor industri dan pertanian yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, tingkat partisipasi tenaga kerja menjadi indikator penting, mencerminkan keterlibatan penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumenep

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data pada Tabel 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep selama periode 1995–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif pada awal periode namun secara umum bergerak meningkat secara signifikan dalam jangka panjang. Pada tahun 1995, IPM tercatat sebesar 52,35 dan sempat mengalami penurunan hingga akhir 1990-an, yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih rentan akibat ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Pada fase ini, keterbatasan infrastruktur pendidikan, rendahnya kualitas layanan kesehatan, serta minimnya akses transportasi menjadi faktor penghambat utama peningkatan IPM.

Memasuki dekade 2000-an, IPM Sumenep mulai menunjukkan peningkatan lebih stabil seiring dengan membaiknya ekonomi nasional pascakrisis serta meningkatnya program pembangunan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Berbagai program seperti perluasan wajib belajar 9 tahun, peningkatan fasilitas puskesmas, serta penguatan program kesehatan dasar mulai memberikan

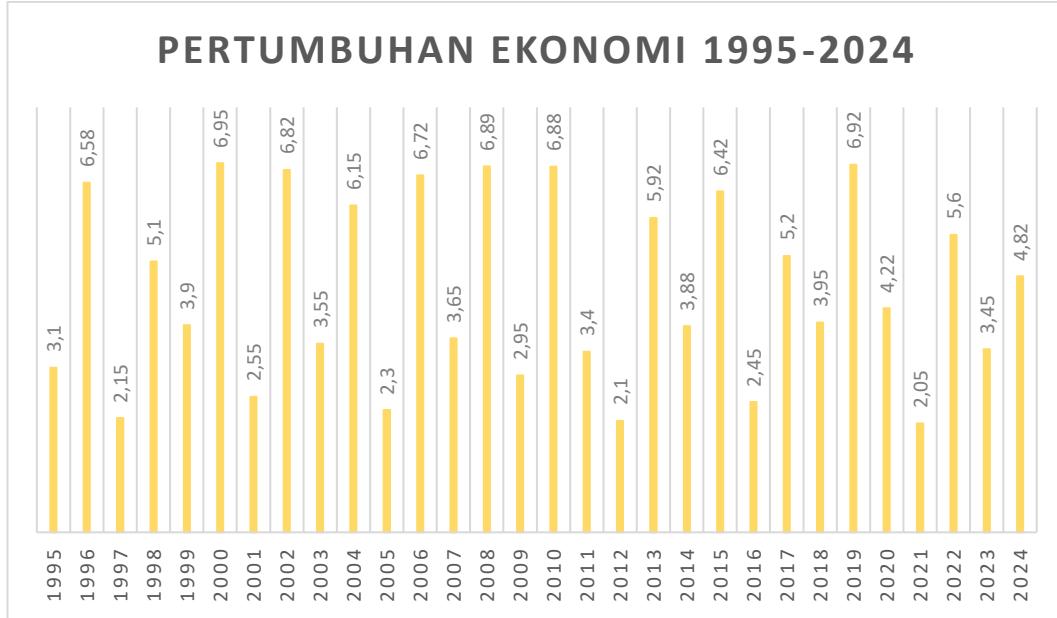
dampak nyata, tercermin dari kenaikan IPM dari 46,35 pada tahun 2000 menjadi 57,61 pada 2004. Meski demikian, tantangan geografis—khususnya keberadaan lebih dari 120 pulau di wilayah Sumenep—menyebabkan pencapaian IPM masih belum secepat daerah daratan, sehingga fluktuasi tetap terjadi pada pertengahan 2000-an.

Periode 2010–2019 menjadi fase peningkatan IPM yang lebih konsisten. Dukungan infrastruktur pendidikan, penambahan tenaga kesehatan, serta berkembangnya aktivitas ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, berkontribusi mendongkrak komponen utama IPM seperti harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan daya beli masyarakat. IPM yang semula 58,12 pada 2010 meningkat hingga mencapai 65,25 pada 2019. Perbaikan akses antarwilayah melalui transportasi laut dan darat juga mengurangi keterisolasi wilayah kepulauan, sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan dasar.

Pada periode 2020–2024, IPM Sumenep masih menunjukkan tren peningkatan meskipun berada dalam kondisi pandemi. Pada 2020, IPM tercatat sejumlah 62,98 dan terus naik hingga mencapai nilai tertinggi sepanjang periode pengamatan, yaitu 69,54 pada 2022. Hal ini mencerminkan ketahanan sosial masyarakat Sumenep serta efektivitas berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan adaptif, hingga penguatan digitalisasi pendidikan. Meski pada 2024 IPM turun menjadi 60,56, secara keseluruhan tren 30 tahun menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang signifikan. Perkembangan ini menggambarkan bahwa Sumenep telah mengalami kemajuan penting dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meskipun ketimpangan antarkecamatan, terutama antara wilayah daratan dan kepulauan, masih menjadi tantangan utama dalam

mewujudkan pembangunan manusia yang lebih merata.

Tabel 1.3 Presentase Data Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumenep



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data pada Tabel 1.2. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep periode 1995–2024, terlihat bahwa laju perekonomian daerah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada pertengahan 1990-an, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,1% pada 1995, kemudian melonjak menjadi 6,58% pada 1996 sebelum turun kembali menjadi 2,15% pada 1997. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional pada masa pra-krisis, di mana sektor pertanian dan perdagangan rakyat di Sumenep sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas dan kestabilan pasar. Memasuki 1998–1999, pertumbuhan kembali tidak stabil dengan angka 5,1% dan 3,9%, sejalan dengan dampak krisis moneter yang memperlemah daya beli masyarakat dan menekan aktivitas ekonomi produktif.

Pada awal 2000-an, pertumbuhan ekonomi bergerak naik meskipun masih menunjukkan variasi antar tahun. Pada 2000, pertumbuhan tercatat 6,95% dan

meningkat drastis menjadi 6,82% pada 2001, sebelum kembali melemah menjadi 2,55% pada 2002. Periode ini menandai transisi ekonomi daerah menuju pemulihan pascakrisis, namun ketergantungan masyarakat pada sektor primer (pertanian, perikanan, dan perkebunan) menyebabkan perekonomian rentan terhadap perubahan cuaca, harga gabah, dan fluktuasi produksi hasil laut. Pada 2003–2009, pertumbuhan berada pada kisaran 3–6%, mencerminkan stabilitas moderat yang sebagian besar didorong oleh sektor pertanian dan usaha mikro. Peningkatan signifikan terjadi pada 2007 dengan nilai 6,89%, dipengaruhi oleh membaiknya hasil panen dan meningkatnya aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional.

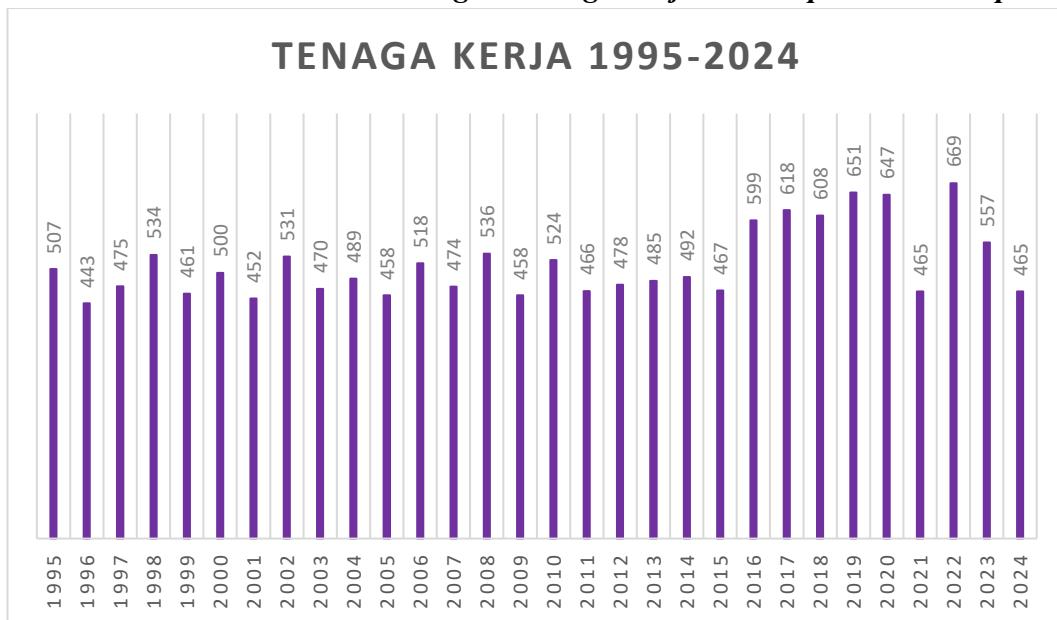
Memasuki 2010–2014, laju pertumbuhan tetap fluktuatif. Pada 2010 pertumbuhan sebesar 3,4%, namun menurun menjadi 2,1% pada 2011 sebelum kembali naik menjadi 5,92% pada 2013. Pola ini mencerminkan transisi struktur ekonomi menuju sektor jasa dan perdagangan yang mulai berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Pada 2015–2017, pertumbuhan menunjukkan tren pemulihan, tercatat 3,88% pada 2015 dan meningkat menjadi 6,42% pada 2017. Peningkatan tersebut turut dipengaruhi oleh mulai populernya destinasi wisata seperti Gili Labak dan Gili Genting, yang membuka kesempatan kerja baru pada sektor transportasi laut, jasa akomodasi, kuliner, dan usaha wisata berbasis masyarakat.

Pada 2018–2020, pertumbuhan kembali menunjukkan ketidakstabilan. Pada 2018, pertumbuhan mencapai 5,2%, namun turun menjadi 3,95% pada 2019 akibat perlambatan ekonomi regional. Tekanan semakin kuat pada 2020 ketika pertumbuhan merosot menjadi 2,05% akibat pandemi COVID-19 yang menghentikan aktivitas pariwisata, melemahkan perdagangan, serta menghambat

produksi UMKM. Meski demikian, pemulihan mulai terlihat sejak 2021 dengan pertumbuhan 4,22%, meningkat menjadi 5,6% pada 2022, dan kembali stabil pada 2024 dengan pertumbuhan 4,82%.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sumenep dalam 30 tahun terakhir mencerminkan karakteristik ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer, rentan terhadap cuaca dan fluktuasi harga komoditas, namun memiliki potensi dinamis melalui sektor pariwisata, UMKM, dan industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perikanan. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa perekonomian Sumenep terus berkembang meskipun masih menghadapi tantangan struktural, terutama ketimpangan antarwilayah daratan dan kepulauan serta keterbatasan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi produktif.

Tabel 1.4 Presentase Data Tingkat Tenaga Kerja di Kabupaten Sumenep



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data pada Tabel 1.3. data tenaga kerja Kabupaten Sumenep periode 1995–2024, jumlah penduduk yang bekerja menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan dinamika ekonomi daerah. Pada pertengahan 1990-an, jumlah

tenaga kerja berada pada kisaran 507 ribu jiwa pada 1995, kemudian mengalami penurunan pada 1996 sebelum kembali meningkat pada 1997. Variasi ini erat kaitannya dengan kondisi ekonomi nasional dan ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian serta perikanan yang sangat sensitif terhadap musim dan perubahan harga komoditas. Memasuki awal 2000-an, jumlah pekerja sempat meningkat hingga mencapai 531 ribu jiwa pada 2003, namun kembali mengalami penurunan pada beberapa tahun berikutnya akibat perubahan produktivitas sektor primer dan terbatasnya diversifikasi mata pencaharian di wilayah kepulauan.

Pada periode 2010–2015, jumlah tenaga kerja bergerak di kisaran 456–492 ribu jiwa dengan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, hasil panen, serta dinamika pasar tenaga kerja regional. Perubahan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor primer, sementara pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor modern. Peningkatan signifikan mulai terlihat sejak 2016, ketika jumlah tenaga kerja naik menjadi 599 ribu jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 668 ribu jiwa pada 2019. Perkembangan tersebut tidak lepas dari tumbuhnya sektor pariwisata berbasis masyarakat di Gili Labak, Gili Genting, dan pulau-pulau lain, yang membuka peluang kerja baru di bidang jasa transportasi laut, akomodasi, kuliner, dan industri kreatif.

Pada masa pandemi 2020–2021, jumlah penduduk bekerja mengalami penurunan akibat terbatasnya aktivitas ekonomi, terutama pada sektor perdagangan dan pariwisata. Namun pemulihan mulai terjadi pada 2022 ketika jumlah tenaga kerja meningkat menjadi 669 ribu jiwa, didorong oleh bangkitnya sektor UMKM, industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perikanan, serta meningkatnya

mobilitas masyarakat. Meski pada 2023–2024 kembali menunjukkan penurunan, tren jangka panjang selama tiga dekade memperlihatkan bahwa pasar kerja Sumenep berkembang seiring diversifikasi ekonomi daerah, meskipun masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada sektor primer dan ketimpangan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan.

Melihat dari fenomena yang telah diuraikan di atas tersebut, Peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang permasalahan yang terjadi. Dimana dari hal tersebut inilah terbentuk kajian dengan judul ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI, TENAGA KERJA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN SUMENEP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar berlakang yang telah dikemukakan oleh peneliti di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumenep?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumenep?
3. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia

terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumenep.

2. Untuk menganalisis pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumenep.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari dtujuan dibuatnya penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam menyusun kebijakan dan strategi yang tepat guna mengatasi tantangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep.
2. Bagi kalangan peneliti, temuan dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi penelitian sejenis maupun sebagai landasan dalam memperluas kajian di bidang ekonomi